



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samsoir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
23. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Samosir yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  - (2) Perubahan RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara umum memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2018.
  - (3) Perubahan RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh masukan dari hasil penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 berfungsi sebagai acuan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

-BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

Apabila pada tahap penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, terdapat rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2018 yang belum diakomodir di dalam Perubahan RKPD 2018 ini, baik yang bersumber dari usulan amanat peraturan/surat pemerintah atasan, usulan dari Unsur Pimpinan Daerah, Janji Politik Kepala Daerah dan hasil reses DPRD atau pokok-pokok pikiran DPRD, rumusan rencana program/kegiatan dimaksud tetap dinyatakan sebagai bahan yang dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 dengan tetap mempedomani hasil yang berkembang dari hasil pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif atas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

**Cap / dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige

Pada Tanggal 6 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

**Cap / dto**

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN SANTI SIAGIAN, SH

NIP. 19750804 200502 1 002

